

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus pada
Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan)**

Kessi Ronia

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Semarang
Kessy.rn@gmail.com**

ABSTRACT

The government lately makes an effort to increase from tax sector revenue. A very high revenue target and the always significantly increasing tax revenue from year to year prove that tax is an excellent source for government income. Therefore, government continually seeks to enhance domestic revenue from the tax sector to meet the State Budget (APBN) demand. This thing is not only by the government itself but also need the society participation as a taxpayer. The participation is in the form of compliance in paying tax liabilities.

This research aimed to examine the effect of service, income, SPPT, information and sanction to taxpayer compliance located at Pekalongan Utara sub-district with the sample of 50 responders in Pekalongan Utara sub-district. Bilinear regression used as analysis tool that has questioner test (validity and reliability), classic assumption test (normality, multi-collinear), bilinear regression test, hypothesis test (test and f) and determination test.

Bilinear analysis results that the most influencing factor of taxpayer compliance is the service by 0,351 of regression coefficient value and positively influential and significant by 0,000 of probability value. Income Information and SPPT are the second, third and fourth that influence to taxpayer by 0,337; 0,125 and 0,115 of regression coefficient value. It positive influenced and significantly by 0,000; 0,030 and 0,027 of probability value. Whereas, the sanction has not partially influenced to the taxpayer, it shows 0,027 of regression coefficient value. Simultaneously, Income Service, SPPT, Information and Sanction have a significant influence by 0,000 of probability value. By the determination coefficient test of five variables above can explain 96,9 % percentage of the Y variable

Keyword: Income Service, SPPT, Sanction Information, Compliance

PENDAHULUAN

Pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara. Kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin

terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan negara, memang menuntut pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak. Realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target APBN sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6% (Pajak.go.id).

Sebagian besar penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas tidak bisa lagi diandalkan.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pungutan pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Lebih lanjut Dirjen Pajak menambahkan realisasi penerimaan perpajakan hingga 28 September 2012 mencapai Rp 885,025 triliun atau 66,0 persen dari target yang ditetapkan APBN-P2012. Meskipun realisasi tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011 (Rp 513,363 triliun), penerimaan perpajakan pada Agustus dan September mulai menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, penerimaan perpajakan pada Agustus mencapai Rp62,708 triliun sementara September mencapai Rp 64,423 triliun. Penerimaan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan April yang mencapai Rp 81,94 triliun atau Juni yang melewati Rp 70,64 triliun (Pajak.go.id).

Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN. Hal ini tidak hanya dari pemerintah sendiri akan tetapi juga perlu peran serta dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. Peran serta tersebut yakni dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan.

Pemerintah juga telah berupaya untuk mewujudkan kenyamanan bagi

Wajib Pajak dalam membayar PBB yakni menggunakan *Semi Self Assessment System* untuk pemungutan PBB di mana Wajib Pajak hanya tinggal menunggu SPPT dari Dispenda hal ini dimaksudkan agar kenyamanan Wajib Pajak menumbuhkan kesadaran dalam hal membayar pajak.

Data yang diperoleh Kecamatan Pekalongan Utara menyatakan persentase Wajib Pajak dan besarnya pajak diperoleh selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1
Daftar Penerimaan PBB Kecamatan Pekalongan Utara

Tahun	Wajib Pajak yang membayar PBB	Jumlah Pajak (Rp)
2007	86,72%	896.473.556
2008	89,13%	918.078.569
2009	94,16%	964.257.921
2010	92,44%	947.672.685
2011	93,06%	953.548.256

Sumber : Kecamatan Pekalongan Utara

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya persentase jumlah Wajib Pajak yang telah membayar PBB di Kecamatan Pekalongan Utara cukup signifikan. Selama 5 (lima) tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah Wajib Pajak yang patuh dalam membayar PBB belum mencapai 100%. Tiap tahunnya baik pihak kantor pajak maupun pemerintah daerah terus melakukan usaha guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan juga meningkat.

Hasil dari wawancara dengan camat Pekalongan utara menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adalah penetapan SPPT. Ada beberapa keluhan dari Wajib Pajak mengenai SPPT yang diterima. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi adalah masalah ekonomi.

Dari uraian latar belakang tersebut Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor kepatuhan Wajib Pajak, sehingga peneliti mengangkat judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan).

Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:”Apakah faktor pelayanan, pendapatan Wajib Pajak, SPPT, penyuluhan dan sanksi berpengaruh terhadap pembayaran PBB?”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dengan membagikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada seluruh Wajib Pajak yang dikenakan PBB pada Kecamatan Pekalongan Utara, Kabupaten Pekalongan.

2) Data sekunder

Yaitu sumber data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang telah ada pada kantor kecamatan, internet, dan sumber lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data kualitatif

Yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi berbentuk keterangan-keterangan dari petugas dari Wajib Pajak di Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Data Kuantitatif

Yaitu data yang berupa hasil penerimaan PBB dalam tahun 2007-2011.

Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Pengajuan kuesioner ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis dalam suatu daftar pertanyaan kepada responden. Kuesioner ini menggunakan sistem tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang disertai alternatif jawaban dan responden tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Daftar pertanyaan diberikan kepada Wajib Pajak yang dikenakan PBB di Kecamatan Pekalongan Utara. Data yang dikumpulkan meliputi :

b. Identitas responden

c. Data mengenai tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang dikenakan PBB di Kecamatan Pekalongan Utara. Sampel yang di ambil adalah sebanyak 50 responden.

Definisi yang diberikan kepada suatu variabel dapat dilakukan dengan memberikan arti atau memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2007), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

a) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d) Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Indikator dari variabel ini adalah: Pemahaman terhadap Undang-undang perpajakan, Membayar Pajak sesuai dengan kewajiban, Melakukan pembayaran tepat waktu, Membayar pajak berarti menjadi warga negara yang baik, Tidak memiliki tunggakan pajak.

Variabel Independen dalam penelitian ini:

b) Pelayanan (X_1)

Pelayanan merupakan cara atau aktivitas yang dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus dalam rangka memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak (Muqodim, 1999). Selanjutnya variabel Pelayanan dapat diukur dengan indikator : Tanggapan, Sikap, Komunikasi, Fasilitas, Kedisiplinan.

c) Pendapatan Wajib Pajak (X_2)

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu. Selanjutnya variabel Pendapatan Wajib Pajak dapat diukur dengan indikator : Jumlah PBB yang harus dibayar, Jumlah pengeluaran per bulan, Pekerjaan, Penghasilan per bulan, Penghasilan tambahan yang mungkin didapat dalam periode tertentu.

d) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X_3)

SPPT merupakan surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak (Erly Suandy, 2005). Selanjutnya variabel SPPT dapat diukur dengan indikator : Penetapan NJOP tanah dan bangunan, Penetapan luas tanah dan bangunan, Penetapan kelas tanah dan bangunan, Tanggal jatuh tempo yang

tertera di SPPT, Tempat atau lokasi pembayaran pajak.

e) Penyuluhan (X_4)

Penyuluhan adalah pemberian informasi yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat Wajib Pajak seperti pengetahuan tentang perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pelatihan, kursus dan seminar. Selanjutnya variabel Penyuluhan dapat diukur dengan indikator : Waktu penyuluhan, Materi penyuluhan, Pemahaman materi penyuluhan, Cara petugas pajak dalam menyampaikan materi penyuluhan, Keikutsertaan Wajib Pajak dalam penyuluhan.

f) Sanksi (X_5)

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana (Muqodim, 1999). Selanjutnya variabel sanksi dapat diukur dengan indikator : Tanggapan Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan, Pengenaan besar kecilnya sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, Pengenaan sanksi yang tegas terhadap semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, Denda yang diberikan tidak memberatkan Wajib Pajak, Tidak adanya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo.

Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Gozhali, 2006). Alat untuk mengukur validitas adalah *korelasi product Moment* dari pearson (Sugiyono, 2005). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n - 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Suatu indikator dikatakan valid, apabila n

= 48 dan $\alpha = 0,05$. Maka $r_{\text{tabel}} = 0,235$ dengan ketentuan (Gozhali, 2006) :

Hasil $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} (0,235) = \text{valid}$

Hasil $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}} (0,235) = \text{tidak valid}$

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kestabilan dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu instrument dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Alat untuk mengukur reliabilitas adalah *Koefisien Alpha Cronbach* (Sugiyono, 2005). Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Gozhali, 2006):

Hasil $\alpha > 0,6 = \text{reliabel}$

Hasil $\alpha < 0,6 = \text{tidak reliable}$

Uji Regresi Linier Berganda

Alat analisis data yang digunakan adalah Regresi linier berganda. Yang merupakan suatu Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada diantara variabel-variabel yang digunakan, sehingga dari hubungan tersebut sebuah variabel akan dapat ditaksir apabila variabel yang lain telah diketahui. Rumus untuk mencari koefisien regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Rumus : $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen)

X₁ : Variabel Pelayanan (variabel independen)

X₂ : Variabel Pendapatan (variabel independen)

X₃ : Variabel SPPT (variabel independen)

X₄ : Variabel Penyuluhan (variabel independen)

X₅ : Variabel Sanksi (variabel independen)

B₀ = Konstanta

B₁ s.d B₅ = Koefisien regresi yang akan dihitung

e : error

Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah yang memenuhi seluruh uji asumsi klasik, yaitu data terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, bebas dari autokolerasi, dan homoskedastisitas. Pada penelitian ini, tidak dilakukan autokolerasi karena penelitian ini menggunakan kuesioner yang tidak menggunakan observasi berurutan sepanjang waktu.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik yang pertama adalah dengan melihat grafik histogram, jika pada grafik tersebut memberikan pola distribusi yang normal (simetris/tidak menceng) maka menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Cara lain yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada suatu sumbu diagonal dari grafik normal probability plot (Normal P-P Plot).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2006). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika varians dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2006).

Bentuk hipotesanya :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima bila $sig > \alpha = 0,05$

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak bila $sig < \alpha = 0,05$

Uji t

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2006).

Bentuk hipotesanya :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima bila $sig > \alpha = 0,05$

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak bila $sig < \alpha = 0,05$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Gozhali,2006). Alat untuk mengukur validitas adalah *korelasi product Moment* dari pearson (Sugiyono, 2005). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n - 2,

dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Suatu indikator dikatakan valid, apabila n = 48 dan $\alpha = 0,05$. Maka $r_{tabel} = 0,235$ dengan ketentuan (Gozhali,2006) :

Hasil $r_{hitung} > r_{tabel} (0,235) = \text{valid}$

Hasil $r_{hitung} < r_{tabel} (0,235) = \text{tidak valid}$

Dari hasil uji validitas, seluruh variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari 0,235.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kestabilan dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu instrument dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Alat untuk mengukur reliabilitas adalah *Koefisien Alpha Cronbach* (Sugiyono, 2005). Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Gozhali, 2006):

Hasil $\alpha > 0,6 = \text{reliabel}$

Hasil $\alpha < 0,6 = \text{tidak reliabel}$

Dari hasil uji validitas, seluruh variabel dinyatakan reliabel karena nilai *alpha cronbach* semua variabel di atas 0,60.

Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan output yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Output Regresi Linier Berganda

Sumber : Data yang diolah

Dilihat dari tabel 2. pada hasil pengujian dengan SPSS, didapatkan persamaan garis linier berganda (yang dilihat dari koefisien tidak standar atau *unstandardized coefficients*) didapatkan :

$$Y = 0,114 + 0,351 X_1 + 0,125 X_2 + 0,115 X_3 + 0,337 X_4 + 0,081 X_5$$

Keterangan :

Y = variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

$b_1 - b_5$ = koefisien regresi

X_1 = Pelayanan

X_2 = Pendapatan

X_3 = SPPT

X_4 = Penyuluhan

X_5 = Sanksi

berdasarkan persamaan dapat diketahui bahwa :

a. Koefisien regresi constant diketahui sebesar 0,114 adalah positif, artinya apabila variabel independen (pelayanan, pendapatan, SPPT, penyuluhan dan sanksi) konstan atau tetap maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) bernilai positif.

b. Koefisien regresi variabel pelayanan diketahui 0,351 adalah positif artinya bahwa semakin meningkat pelayanan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

c. Koefisien regresi variabel pendapatan diketahui 0,125 adalah positif artinya bahwa semakin meningkat pendapatan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

d. Koefisien regresi variabel pendapatan diketahui 0,115 adalah positif artinya bahwa semakin baik dan tepat waktu penyampaian SPPT maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

e. Koefisien regresi variabel penyuluhan diketahui 0,337 adalah positif, artinya bahwa semakin baik atau menarik penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.114	.110		1.030	.309		
R_Pelayanan	.351	.075	.349	4.681	.000	.116	8.634
R_Pendapatan	.125	.056	.121	2.250	.030	.222	4.506
R_SPPT	.115	.050	.121	2.283	.027	.228	4.383
R_Penyuluhan	.337	.067	.359	4.998	.000	.125	8.010
R_Sanksi	.081	.060	.087	1.343	.186	.152	6.590

a. Dependent

Variable:

R_Kepatuhan_WP

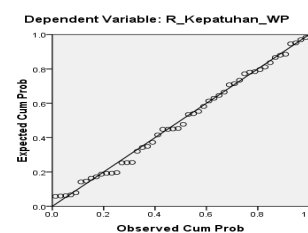
f. Koefisien regresi variabel sanksi diketahui 0,081 adalah positif artinya bahwa semakin tegas dan adil Sanksi yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. (Ghozali, 2006)

Dalam grafik normalitas P-Plot diatas terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data penelitian berdistribusi normal, sehingga layak untuk menggunakan model regresi dalam pengujian hipotesisnya. Untuk lebih

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



mendukung uji grafik P-Plot diatas,

penelitian ini dilengkapi uji statistik. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 3.

Sumber: Data yang diolah

Dari uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapat angka $Asymp.sig > 0,05$ menunjukkan nilai 0,932. Sehingga data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2006).

Hasil pengujian uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
	1 (Constant)	.114	.110		1.030	.309	
R_Pelayanan	.351	.075	.349	4.681	.000	.116	8.634
R_Pendapatan	.125	.056	.121	2.250	.030	.222	4.506
R_SPPT	.115	.050	.121	2.283	.027	.228	4.383
R_Penyuluhan	.337	.067	.359	4.998	.000	.125	8.010
R_Sanksi	.081	.060	.087	1.343	.186	.152	6.590

a. Dependent Variable: R_Kepatuhan_WP

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 4. didapat angka VIF yaitu

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.986 ^a	.972	.969	.09954	2.363

a. Predictors: (Constant), R_Sanksi, R_SPPT, R_Pendapatan, R_Penyuluhan, R_Pelayanan

b. Dependent Variable: R_Kepatuhan_WP

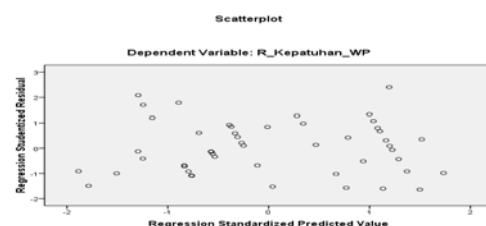
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09432802
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.540
Asymp. Sig. (2-tailed)		.932

a. Test distribution is Normal.

kurang dari 10 dan Tolerance yang lebih dari 0,10 yaitu VIF untuk variabel Pelayanan (X_1) sebesar 8,634 dan Tolerance sebesar 0,116 ;VIF untuk variabel Pendapatan (X_2) sebesar 4,506 dan Tolerance sebesar 0,222; VIF untuk variabel SPPT (X_3) sebesar 4,383 dan Tolerance sebesar 0,228; VIF untuk variabel Penyuluhan (X_4) sebesar 8,010 dan Tolerance sebesar 0,125 dan VIF untuk variabel Sanksi (X_5) sebesar 6,590 dan Tolerance sebesar 0,152. Hal ini berarti tidak terdapat asumsi multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006).



ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.985	5	2.997	302.452	.000 ^a
Residual	.436	44	.010		
Total	15.421	49			

a. Predictors: (Constant), R_Sanksi, R_SPPT, R_Pendapatan, R_Penyuluhan, R_Pelayanan

b. Dependent Variable:
R_Kepatuhan_WP

Melihat gambar terlihat tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka *tidak terjadi asumsi heteroskedastisitas*. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas, sehingga penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y), dengan output sebagai berikut :

Tabel 7.

Output Koefisien Determinasi

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 7. didapatkan angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,969. Hal ini berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pelayanan, Pendapatan, SPPT, Penyuluhan dan Sanksi sebesar 96,9%. Sedangkan sebesar (100% - 96,9%) = 3,1%, dapat dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya: Pendidikan, usia dan lainnya.

Uji F

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2006).

Bentuk hipotesanya :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima bila $sig > \alpha = 0,05$

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak bila $sig < \alpha = 0,05$

Tabel 6.
Output Uji Anova

Sumber : Data yang diolah

Tabel 6. hasil pengujian dengan SPSS didapatkan angka F hitung antara Pelayanan, Pendapatan, SPPT, Penyuluhan dan Sanksi terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 302,452 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; sehingga terdapat pada daerah H_0 ditolak, artinya variabel Pelayanan, Pendapatan, SPPT, Penyuluhan dan Sanksi secara simultan/bersama-sama berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan model regresi dalam penelitian ini dikatakan fit atau layak.

Uji t

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2006).

Bentuk hipotesanya :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima bila $sig > \alpha = 0,05$

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak bila $sig < \alpha = 0,05$

Tabel 5.

Output Nilai Probabilitas

Dari tabel 5. dapat dijelaskan nilai probabilitas dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Uji Pengaruh antara Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan angka t-hitung antara Pelayanan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 4,681 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; berarti terletak pada daerah H_0 ditolak, sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pelayanan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Adanya angka signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik dan meningkat Pelayanan (tanggapan, sikap, komunikasi, fasilitas dan kedisiplinan), maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan WP dalam membayar PBB.

b. Uji Pengaruh antara Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan angka t-hitung antara Pendapatan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 2,250 dan nilai probabilitas sebesar 0,030 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; berarti terletak pada daerah H_0 ditolak, sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Angka signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat pendapatan untuk membayar PBB maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

c. Uji Pengaruh antara SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan angka t-hitung antara SPPT (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 2,283 dan nilai probabilitas sebesar 0,027 lebih kecil

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.114	.110		1.030	.309		
R_Pelayanan	.351	.075	.349	4.681	.000	.116	8.634
R_Pendapatan	.125	.056	.121	2.250	.030	.222	4.506
R_SPPT	.115	.050	.121	2.283	.027	.228	4.383
R_Penyuluhan	.337	.067	.359	4.998	.000	.125	8.010
R_Sanksi	.081	.060	.087	1.343	.186	.152	6.590

b. Dependent Variable: R_Kepatuhan_WP

Sumber : Data yang diolah

dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; berarti terletak pada daerah H_0 ditolak, sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara SPPT (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Angka signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik dan tepat waktu penyampaian SPPT maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

d. Uji Pengaruh antara Penyuluhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan angka t-hitung antara Penyuluhan (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 4,998 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; berarti terletak pada daerah H_0 ditolak, sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penyuluhan (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Angka signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik dan menarik materi penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

e. Uji Pengaruh antara Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan angka t-hitung antara Sanksi (X_5) terhadap Kepatuhan WP (Y) sebesar 1,343 dan nilai probabilitas sebesar 0,186 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; berarti terletak pada daerah H_0 diterima, sehingga secara parsial (individu) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Adanya angka yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa meningkat atau tidaknya sanksi yang diberikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Jumlah penduduk di Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 71.753 jiwa dan terdiri dari sepuluh kelurahan yaitu, kelurahan Bandengan, Degayu, Dukuh, Kandang Panjang, Krapyak Kidul, Krapyak Lor, Kraton Lor, Pabeyan, Panjang Wetan dan Panjang Baru. Responden dari penelitian ini didapat melalui sistem random sampling, peneliti memilih responden dengan ketentuan mengambil secara random lima responden dari delapan kelurahan yaitu kelurahan Bandengan, Degayu, Kandang Panjang, Krapyak Lor, Kraton Lor, Pabeyan, Panjang Wetan dan Panjang baru. Peneliti hanya mengambil delapan kelurahan dengan alasan kelurahan Krapyak Kidul dan Dukuh sulit di jangkau sehingga menjadi kendala bagi peneliti untuk mengambil sampel di kelurahan tersebut. Kecamatan Pekalongan Utara sendiri terletak di pesisir pantai utara dengan masyarakatnya yang rata-rata bertamatan SD, hal ini yang menyebabkan persepsi responden terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Pekalongan Utara sangat baik. Dari segi kepercayaan masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara sangat

tinggi, hal ini yang menjadi salah satu alasan Wajib Pajak di Kecamatan Pekalongan Utara patuh terhadap pajak karena mereka menganggap bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar tepat waktu.

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Muqodim (1999), tugas administrasi perpajakan yaitu berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pemberian sanksi administrasi. Pelayanan merupakan cara atau aktivitas yang dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus dalam rangka memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pelayanan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,351 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat pengaruh dari Pelayanan (tanggapan, sikap, komunikasi, fasilitas dan kedisiplinan), maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pelayanan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan keinginan Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Keluhan dari Wajib Pajak mengenai rob (air laut pasang) yang sering terjadi di kantor Kecamatan Pekalongan Utara menjadi salah satu hal yang perlu ditindak lanjuti oleh petugas pajak di kantor Kecamatan Pekalongan Utara.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut PSAK No.23 Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pengukuran pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu.

Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu dengan nilai koefisien regresi 0,125 dan nilai signifikansinya 0,030. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin besar pendapatan yang dimiliki Wajib Pajak maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak (Erly Suandy, 2005).

Hasil pengujian hipotesis ke tiga diperoleh bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara SPPT (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi 0,115 dan nilai signifikansi 0,027. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh antara SPPT dengan kepatuhan Wajib

Pajak. Artinya, penetapan kelas dan luas tanah yang telah sesuai dengan keadaan objek pajak serta tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penyuluhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya dengan pemberian penyuluhan. Penyuluhan adalah pemberian informasi yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat Wajib Pajak seperti pengetahuan tentang perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pelatihan, kursus dan seminar. Melakukan publikasi berupa propaganda, dan pemasyarakatan slogan (Muqodim, 1999).

Hasil pengujian hipotesis ke empat diperoleh bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penyuluhan (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi 0,337 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian materi penyuluhan dari petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, semakin baik dan menarik penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Muqodim (1999) Wajib Pajak dan pejabat atau pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Suatu perbuatan yang menyalahi atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada dapat dikenai sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hasil pengujian hipotesis ke lima diperoleh bahwa secara parsial (individu)

tidak ada pengaruh yang signifikan antara Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien regresi 0,81 dan signifikansi $0,186 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kec. Pekalongan Utara. Wajib Pajak cenderung tidak terpengaruh dengan besar kecilnya sanksi yang diberikan oleh petugas pajak. Hal ini dipengaruhi karena Wajib Pajak di Kec. Pekalongan Utara telah merasa puas dengan Pelayanan (tanggapan, sikap, komunikasi, fasilitas dan kedisiplinan), Pendapatan (jumlah PBB yang harus dibayar, pengeluaran per bulan, pekerjaan, penghasilan per bulan dan penghasilan tambahan), SPPT (penetapan NJOP tanah dan bangunan, penetapan luas tanah dan bangunan, penetapan kelas tanah dan bangunan, tanggal jatuh tempo dan lokasi atau tempat pembayaran), Penyuluhan (penyuluhan dengan pertimbangan waktu yang tepat, materi penyuluhan yang menarik, pemahaman materi penyuluhan, cara penyampaian materi dan keikutsertaan dalam penyuluhan) di Kec. Pekalongan Utara. Wajib Pajak merasa dengan adanya pelayanan yang baik, pendapatan yang meningkat dan mencukupi, penyampaian SPPT yang tepat waktu, penyuluhan yang baik dan menarik maka sanksi tidak diperlukan lagi. Dengan keadaan wilayah di Kecamatan Pekalongan Utara sendiri yang sering terjadi rob (air laut pasang) menyebabkan masyarakat atau Wajib Pajak lebih memerlukan pelayanan, pendapatan, SPPT dan penyuluhan, sehingga sanksi tidak menjadi pengaruh atau penyebab Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Pekalongan Utara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik Pelayanan petugas pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
2. Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat pendapatan Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
3. SPPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin sesuai SPPT dengan objek pajak, maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
4. Penyuluhan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin menarik penyuluhan yang diberikan petugas pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
5. Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya besar atau kecilnya sanksi yang diberikan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Secara bersama-sama Pelayanan, Pendapatan, SPPT, Penyuluhan dan Sanksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7. Pelayanan, Pendapatan, SPPT, Penyuluhan dan Sanksi memberikan pengaruh sebesar 96,9 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara sisanya sebesar 3,1 % dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya tindakan penagihan langsung kepada Wajib Pajak saat terjadi rob (air laut pasang) yang membanjiri kantor Kecamatan Pekalongan Utara, sehingga masyarakat atau Wajib Pajak lebih nyaman dalam melakukan pembayaran PBB di kantor Kecamatan Pekalongan Utara.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali faktor-faktor lain, misalnya menambahkan variable bebas yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pengambilan sampel juga perlu dipertimbangkan, misalnya dengan membandingkan sampel di dua kecamatan berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Frederica, Diana, 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*”, Jurnal Akuntansi, Vol. 8 No. 3, Hal.261-282
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4, PB Undip, Semarang
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, 2011. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1, Hal.126-142
- Harinurdin, Erwin, 2009. “*Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*”, Jurnal Administrasi dan Organisasi, Vol. 16 No. 2, Hal.96-104
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *PSAK No.23 tentang Pendapatan (Reformat 2007)*, IAI, Jakarta
- Koentarto, Ilham, 2011, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3 No.2, Hal.243-258
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Edisi revisi, Andi Offset, Yogyakarta
- Dirjen Pajak, 2012. “Penerimaan Pajak 2011 capai 99.3 persen”.
<http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen>
- Muqodim, 1999. *Perpajakan*. Edisi Kedua, UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, 2012. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007”.
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/192~PMK.03~2007Per.htm>
- Rapina, et. al, 2011. “*Pengaruh Penerepan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jurnal Riser Akuntansi, Vol. 3 No. 2
- Sekaran, Uma, 2009. *Research Methods For Business*. Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly, 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. CV Alfabeta. Bandung
- Susanto, Herman, 2012. “Penerimaan PBB kota Pekalongan Hanya 46 Persen”.
<http://radarpekelongan.blogspot.com/2012/09/penerimaan-pbb-hanya-46.html>

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas,
2002.*Perpajakan Indonesia*. Edisi
Pertama, Salemba Empat, Jakarta

Yadnyana, I Ketut dan Ida Bagus Sudiksa,
2011. “*Pengaruh Peraturan Pajak
Serta Sikap Wajib Pajak Pada
Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi
Di Kota Denpasar*”, Jurnal Kertha
Wicaksana, Vol. 17 No.2, Hal.197-
206

Zain, Mohammad, 2007.*Manajemen
Perpajakan*. Edisi Tiga, Salemba
Empat, Jakarta